

MEMANDIRIKAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

MAKING WOMEN'S INDEPENDENCE THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM²

Atik Rahmawati dan Arista Bayu Anggara

FISIP Universitas Jember
Pos-el: rahmadilli@gmail.com

Abstrak

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal itu mendorong PT. Bumi Suksesindo membentuk divisi khusus yang mengelola dana sosial perusahaan dalam sebuah departemen yang dinamakan Departemen CRD (*Community Relation and Development Department*). Pembentukan departemen ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam pengelolaan program sekaligus memastikan bahwa CSR dapat dijalankan dan bermanfaat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu kegiatan yang telah berhasil memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat adalah program pemberdayaan perempuan dengan membentuk kelompok usaha budi daya jamur tiram. Program ini menempatkan perempuan yang semula sebatas mengelola keuangan rumah tangga menjadi tenaga produktif yang mampu menyumbangkan pendapatan bagi peningkatan ekonomi keluarga.

Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan, pemberdayaan perempuan, budi daya jamur tiram

Abstract

UU no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, requires each company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) program. This encourages PT. Earth Suksesindo forms a special division that manages the social fund company in a department called the Department of Community Relations and Development Department. The formation of this department indicates the seriousness of the company in the management of the program while ensuring that CSR can be executed and useful for the development of social, economic, and environmental. One of the activities that has managed a positive impact on improving the local economy is the empowerment of women by forming groups of oyster mushroom cultivation. This program puts women initially limited to managing household finances into productive workers who are able to contribute an income to the economic improvement of families.

Keywords: corporate social responsibility, empowerment of women, oyster mushroom cultivation

² Artikel ini merupakan pengembangan dari karya ilmiah tugas akhir mahasiswa dengan judul "Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Budi Daya Jamur Tiram Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Bumi Suksesindo (BSI) (Studi Deskriptif Pada Kelompok Pulau Merah Berkarya Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)".

A. Pendahuluan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan. PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) sebagai perusahaan tambang emas merupakan salah satu perusahaan yang telah melaksanakan program CSR yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lingkup pelaksanaan program CSR PT. BSI berdasarkan data dari Departement CRD (*Community Relation and Development Departement*) dalam Buletin Tumpang Pitu (*Bersama Membangun Pesanggaran*) PT. Bumi Suksesindo (2012:8) adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Hubungan Masyarakat, yaitu menjalin hubungan dengan para *stakeholder* mulai dari tingkat lokal sampai wilayah Kabupaten. *Stakeholder* yang dimaksud berasal dari berbagai kalangan seperti pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media cetak dan elektronik serta Perguruan Tinggi dengan berpartisipasi baik secara langsung maupun financial dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para *stakeholder*.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu bentuk-bentuk program dan kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Pembangunan infrastruktur, meliputi program-program yang bertujuan peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, adalah program dan kegiatan yang bertujuan peningkatan sumber daya manusia baik melalui program pendidikan formal dan nonformal serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Realitas menunjukkan bahwa dari keempat program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. BSI tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai program yang berbentuk program pemberdayaan masyarakat adalah program pengembangan ekonomi lokal, dalam hal ini berupa program-program dan kegiatan *empowerment* baik secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan budi daya jamur tiram. Budi daya Jamur Tiram merupakan program yang khusus diperuntukkan bagi upaya meningkatkan peran perempuan di desa-desa yang terletak di sekitar tambang dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus sebagai salah satu wujud kepedulian PT. BSI akan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dari implementasi yang ada berdasarkan informasi dari Departement CRD (*Community Relation and Development Departement*) PT. BSI menunjukkan bahwa kelompok budi daya jamur tiram Pulau Merah Berkarya Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur merupakan bagian *pilot project* (proyek percontohan) dari program tersebut, pertimbangan tersebut berdasarkan pada lokasi kelompok yang berada paling dekat dengan lokasi PT. BSI. Hal ini sesuai dengan strategi pelaksanaan program CSR PT. BSI yang menetapkan prioritas wilayah yang meliputi: a. wilayah *ring 1*, yaitu wilayah Kecamatan Pesanggaran yang mencakup 5 Desa (Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan, dan Sarongan); b. wilayah *ring 2*, yaitu wilayah di luar Kecamatan Pesanggaran tetapi masih berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi; c. wilayah *ring 3*, yaitu wilayah Kabupaten/ Kota terdekat dan Provinsi Jawa Timur.

Sebagai sebuah program yang mengedepankan aspek pemberdayaan, pengembangan kapasitas dari *beneficiaries* (penerima manfaat) menjadi prioritas program yang diimplementasikan. Hal itu yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pelatihan kepada sasaran program sebelum



Gambar1.1 Suasana Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram

Sumber: Diolah penulis, Maret 2014

Program pemberdayaan tersebut dimulai dengan pelaksanaan pelatihan. Informasi menunjukkan bahwa: “Program pelatihan dilaksanakan pada tanggal 8–9 Oktober 2013 dengan mendatangkan seorang trainer dari kota Pasuruan yang bernama Pak Kaiman. Pak Kaiman adalah seorang pengusaha sukses dibidang budi daya jamur tiram yang telah banyak mendapatkan penghargaan dan juga sering di undang sebagai pembicara nara sumber yang banyak sekali mempunyai pengalaman tentang budi daya jamur” (<http://bisniskeuangan.kompas.com>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2014).

Tindak lanjut dari pelatihan tersebut, pada periode pertama pelaksanaan program, dibentuk “kelompok usaha jamur tiram”, dalam kegiatan ini PT. BSI memfasilitasi kelompok guna membangun usaha jamur dengan membantu pendanaan yang tujuannya agar kelompok dapat membangun rumah jamur dan modal awal untuk pembelian bahan dan alat produksi. Pada periode-periode selanjutnya diharapkan kelompok sudah mulai mandiri dengan mengelola dana secara swakarya sebagai hasil usaha jamur tiram. Kegiatan ini berdampak positif bagi kehidupan warga hal ini ditunjukkan dengan adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah dalam hal ini dari Camat Pesanggaran, yaitu Bapak Drs.

Didik Joko Suhono, M.Si. pada saat melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kelompok budi daya jamur tiram “Pulau Merah Berkarya”. Sebagaimana informasi dalam <http://portal.banyuwangikab.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2014 berikut.

“Dalam kesempatan tersebut Camat Pesanggaran minta agar para anggota pokmas senantiasa melakukan upaya-upaya positif terkait dengan pengembangan usaha budi daya jamur tiram yaitu dengan cara selalu menjaga kekompakan antar anggota kelompok, dengan harapan usaha ini akan lebih baik dan lebih maju ke depannya”.

Berdasar pada hal tersebut, karenanya kajian ini bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bumi Suksesindo (BSI) dalam memandirikan perempuan pada Kelompok Pulau Merah Berkarya Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang “Bagaimana Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI) Mampu Memandirikan Perempuan Melalui Kelompok Pulau Merah Berkarya Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ?”.

B. Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dari ketidakberdayaan dan ketergantungan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan pendapat Karl (dalam Pranarka dan Moeljarto, 1996:36) yang memandang sebagai berikut.

“Pemberdayaan wanita sebagai proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan wanita.”

Pemberdayaan perempuan lebih lanjut ditekankan pada pemberdayaan ekonomi, pada dasarnya pemberdayaan ekonomi bertujuan agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Tujuannya adalah untuk mengentaskan ketidakberdayaan secara ekonomi sehingga perempuan dapat memanfaatkan potensi, mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi (Adi, 2007:163). Suharto (2005:58) memberikan penguatan berikut.

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan atau program. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan”.

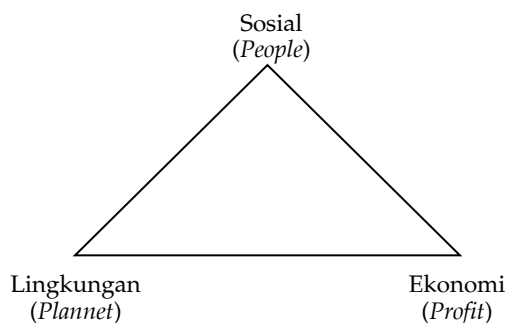
Di lain pihak CSR sendiri merupakan keharusan, dengan rancangan kegiatan ini akan dapat mendorong bermunculannya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi sekitarnya. Kondisi tersebut membentuk adanya pola hubungan baru diantara perusahaan yang pada awalnya hanya mengedepankan aspek *profit* (keuntungan) dengan masyarakat sekitar. Sekaligus hal tersebut dapat memotivasi perusahaan khususnya dalam melaksanakan program CSR. Saidi dan Abidin (2004:69) menggambarkan tiga tahap atau paradigma motivasi perusahaan melaksanakan CSR, di antaranya sebagai berikut.

- a. *Corporate Charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
- b. *Corporate Philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat memberikan sumbangan, biasanya dalam bentuk tunai. Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional.
- c. *Corporate Citizenship*, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

CSR secara konseptual merupakan “suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi *stakeholder* perusahaan” (Lako, 2011:11).

Seseperti dengan Lako, John Elkington (1997) (pada Bab 2 halaman 19) dalam bukunya *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Konsep ini merumuskan bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada laba usaha (*profit*), melainkan juga tindakan nyata yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan (*planet*), dan keadilan (*people*). Hubungan ter-

sebut dapat diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut (Suharto, 2006:5) (pada Bab 2 halaman 19–20).



Gambar 1. Triple Bottom Lines

Sumber: Suharto (2006)

Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwasanya CSR merupakan kegiatan yang lebih berpijak pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) bukanlah kegiatan yang mengedepankan aspek bantuan sosial karitatif yang dicirikan oleh hubungan *patronase*, *Community Development* (ComDev) lebih didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis, dan emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip, Suharto (2007:111).

1. Bekerja bersama berperan serta.
2. Membantu rakyat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan orang lain.
3. Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam.
4. Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mencapai hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya.
5. Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial.

Dalam konteks ini, Kesejahteraan Sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 menyatakan: “Ke-

sejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian berpijak pada penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sehingga terdeskripsikan keadaan yang sebenarnya (*naturalistik*) di lapangan secara mendalam. Teknik penentuan Informan menggunakan *purposive sampling*. Proses analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data mentah yang berasal dari proses observasi, kajian pustaka; kemudian melakukan transkrip data ke bentuk tertulis secara apa adanya (*Verbatim*); Pembuatan Koding; Kategori Data dengan mengikat konsep-konsep kunci dalam suatu dalam kategori; Penyimpulan sementara; Triangulasi berupa proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya; selanjutnya sebagai langkah terakhir berupa Penyimpulan akhir yang menunjukkan bahwa data sudah jenuh (*Saturated*).

D. Program CSR, Manfaat Positif bagi Perusahaan dan Masyarakat

Undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 menyebutkan bahwa CSR wajib dilakukan oleh setiap perusahaan baik di Indonesia maupun di luar Negeri. Sebagai Perseroan Terbatas, PT. Bumi Suksesindo yang merupakan perusahaan tambang emas yang berada di Kabupaten Banyuwangi tepatnya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran pengimplementasikan program-program CSR dengan menganut prinsip *Triple Bottom Lines* sebagaimana diungkapkan informan RM sebagai penanggungjawab dan pendamping atas program pemberdayaan perempuan PT.BSI, sebagai berikut.

“Perusahaan kami mempunyai prinsip salah satunya ialah *Triple Bottom Lines*, dimana perusahaan kami tetap terus beroperasi dan berkembang untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal kami mencari keuntungan kami tidak hanya memikirkan perusahaan kami sendiri namun kami juga memikirkan warga masyarakat setempat begitu pula dengan karyawan-karyawan kami untuk kesejahteraan mereka kami memberikan bantuan. Ya misalnya berbentuk beasiswa bagi pelajar-pelajar yang berprestasi memberikan tunjangan bagi karyawan-karyawan kami, melestarikan alam, memberdayakan masyarakat dan lingkungan yang telah ada, dan lain sebagainya termasuk kegiatan-kegiatan kami dalam hal pertanggung jawaban kami terhadap sosial dan lingkungan sekitar kami...” (RM, 26 Februari 2014).

Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari informan SG selaku ketua Rukun Tetangga yang terlibat dalam proses perencanaan program CSR untuk warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang berpendapat sebagai berikut.

“Kami warga di sini berharap bahwa perusahaan PT. BSI tidak hanya mengambil keuntungan saja dari lingkungan kami tanpa melihat kondisi kami yang harus mencari uang demi kesejahteraan kami dan keluarga kami, saya dan warga di sini berharap perusahaan PT. BSI tidak memanfaatkan kami demi kepentingan perusahaan mereka. Ya... dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PT. BSI saya dan warga tahu bahwa PT. BSI memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada kami dan lingkungan kami ini... dengan seperti ini kan enak... saya dan warga di sini tidak lagi memandang negatif perusahaan PT. BSI yang hanya mengeruk keuntungan perusahaan tanpa menoleh kepada kami yang akan jelas-jelas dirugikan” (SG, 26 Februari 2014).

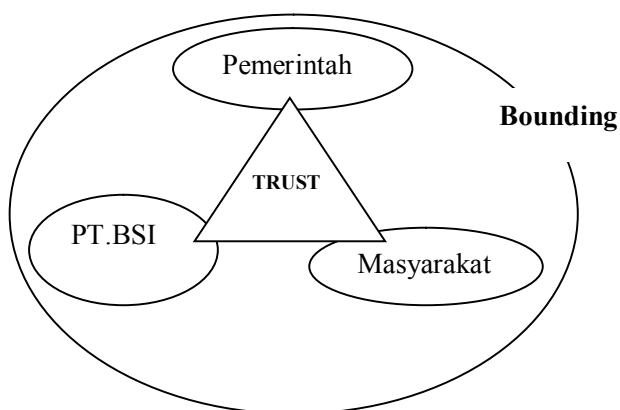
Pendapat tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa program CSR tidak hanya memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi sekaligus memberikan manfaat positif bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Persepsi negatif masya-

rakat akan sebuah perusahaan dapat dengan mudah menimbulkan konflik yang bagaikan “*api dalam sekam*” dapat memengaruhi pergerakan roda perputaran sebuah perusahaan. Penolakan masyarakat sekitar akan hadirnya sebuah perusahaan sekaligus sangat berdampak bagi jalannya proses produksi, memengaruhi pendapatan, yang tentu saja pada jangka panjang dapat menyebabkan perusahaan *gulung tikar*. Kondisi ini sangat dipahami oleh PT.BSI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas, bahwa proses produksi yang mereka lakukan sangat tergantung dengan kondisi masyarakat. Konflik dengan masyarakat akan menyebabkan terhentinya kegiatan penambangan yang sangat berdampak bagi keberlangsungan PT.BSI. Hal ini juga tercermin dari VISI dan MISI yang diemban oleh perusahaan, Visi dari perusahaan adalah bertindak mulai saat ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan MISI dari perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Menghormati lingkungan dengan meminimalkan dan menyeimbangkan dampak lingkungan dari setiap operasi sesuai kebijakan lingkungan perusahaan dan peraturan yang berlaku dalam konteks mencapai kinerja yang unggul.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kesehatan dan kemajuan pendidikan.
3. Mempromosikan penerapan standart terbaik keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam operasi perusahaan.
4. Memberikan penghargaan terhadap keanekaragaman sosial dan hayati.

Program CSR memberikan ruang bagi PT. BSI menjalankan VISI dan MISI perusahaan dengan mengamankan aset usaha melalui kegiatan yang bermitra dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengemban amanah sebagai pelaksana agar tegaknya Undang-Undang, di lain pihak masyarakat memberikan jaminan

keamanan aset perusahaan untuk terus menjalankan roda usaha. Sebuah pola kemitraan yang sangat strategis bagi terbetuknya *bounding* (ikatan) yang kuat dengan mendasarkan pada *trust* masyarakat. Pola inilah yang dapat menjadi sebuah modal sosial bagi perusahaan dalam pengembangan usaha. Pola tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 2. Pola Kemitraan Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat dari Program CSR

Sumber: Data Penelitian, Diolah 2014

E. *Community Development (ComDev)* sebagai Dasar Pelaksanaan Program CSR

Community Development (ComDev) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2000:29). Pendapat ini memberikan penegasan bahwasanya perencanaan yang ter-sistematis dan *sustainability* menjadi pijakan inti dalam pelaksanaan ComDev.

Searah dengan konsep tersebut, dalam pelaksanaan CSR yang telah dilakukan oleh PT.BSI, RM sebagai *implementor* program mengemukakan bahwa pada proses perencanaan dengan mendasarkan pada *need assessment* awal dari proses identifikasi di masyarakat perusahaan merencanakan tiga program yang akan

dilakukan, yaitu: ternak kambing, ternak bebek, dan budi daya jamur. *Planning* kegiatan tersebut terefleksi dalam lima langkah pelaksanaan kegiatan sebagai panduan dalam merumuskan program CR PT. BSI, yaitu *engagement, assessment, Merumuskan Rencana Kegiatan (Plan of Action), Pelaksanaan Kegiatan (Action and Fasilitation), dan Evaluasi dan Terminasi (Evaluation and Termination)*.

Engagement dilakukan dengan melakukan pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi mengenai program yang akan dilaksanakan, dengan tujuan utama agar terbangunnya pemahaman, penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan oleh PT. BSI. Informan SG sebagai ketua RT menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan perusahaan adalah dengan mendatangi dan membicarakan mengenai masalah-masalah yang ada dengan mengatakan hal berikut.

“Dari perusahaan itu menawarkan bentuknya program pemberdayaan mas, awalnya itu ada 3 program untuk daerah sini yaitu: ternak kambing, ternak bebek dan budi daya jamur. Tapi akhirnya yang dijalankan budi daya jamur karena kalau ternak kambing atau ternak bebek.. warga banyak yang *ruet* (susah). Masak bebek atau kambingnya dibawa pulang kerumah masing-masing... itu kan namanya bukan pemberdayaan jadi ya digagalkan” (SG, 26 Februari 2014).

Pada tahap ini, pihak perusahaan juga melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah desa dengan melakukan interaksi atau komunikasi untuk menjalin kerjasama agar saling mengenal dan sekaligus untuk memperkenalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendekatan sekaligus juga merupakan media sosialisasi atas rencana program untuk mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat lokal. Manfaat penting bagi perusahaan dari tahapan *engagement* adalah perubahan paradigma masyarakat terhadap PT. BSI. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami tentang

aktivitas perusahaan serta program sosial yang direncanakan guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Paparan tersebut, sesuai dengan konsep *engagement* (Suharto, 2009:115-116) yang menekankan pada pentingnya menjalin komunikasi dengan masyarakat sasaran melalui kegiatan sosialisasi.

Namun dalam pelaksanaannya upaya sosialisasi tersebut pun tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala utama yang dihadapi adalah kecenderungan sikap apatis masyarakat menanggapi rencana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar di dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang mensyaratkan perlu terbangunnya iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara maksimal.

Assessment menjadi langkah kedua yang akan dijadikan panduan dalam merumuskan program pemberdayaan. Proses *assessment* dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sebagaimana yang dikatakan oleh informan RM sebagai pelaksana program di bawah ini.

“Ya sebelum melaksanakan program kita lihat dulu disekitar perusahaan potensi apa yang perlu dikembangkan. Seperti sumber daya alamnya, sumber daya manusianya atau ada potensi-potensi yang lainnya.” (RM, 26 Februari 2014).

Proses *assessment* mampu mengidentifikasi potensi wilayah, sumber daya manusia, serta sumber daya alam dari komunitas sasaran sekaligus juga mampu menemukan beberapa masalah dan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Perempuan menjadi fokus utama program mendasar pada hasil identifikasi dari pelaksana program bahwa masih banyak mereka yang tidak memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada pada diri perempuan, sebagaimana pernyataan dari RM selaku *implementor* program yang menjelaskan sebagai berikut.

“Setelah diamati, di sini itu yang terlihat pertama kali adalah para ibu-ibu/ para istri

warga sekitar pada waktu pagi setelah para suami pergi bekerja/ anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Bahkan biasanya ada yang terlihat berkumpul untuk ngobrol-ngobrol satu sama lain. Tetapi ada juga yang punya kegiatan seperti punya usaha toko/ warung dirumah” (RM, 26 Februari 2014).

Kondisi ini dibenarkan oleh informan PN selaku *beneficiaries* program sebagai berikut.

“Disini ibu-ibunya ya gini mas, kalau enggak (tidak) ada kerjaan ya nongkrong (singgah main) sambil ngerumpi (membicarakan orang), habis (jadi) mau ngapain (apa) lagi.., ngurus (mengurus) suami ya sudah, anak ya sudah selesai.., paling-paling ya bersih-bersih rumah, la mau kerja ya kerja apa mas..? disini sulit nyari kerja sampingan” (PN, 5 Maret 2014).

Dari pemaparan di atas menunjukkan problematika yang dialami oleh para perempuan bukanlah pada ketidakmampuannya, dan tidak ingin untuk bekerja tetapi lebih pada akses, dan peluang usaha yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berkarya akibatkan mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai produktif bagi peningkatan kehidupan keluarga, dengan hanya melakukan kegiatan “*nongkrong*” (berkumpul/singgah main) sambil “*ngerumpi*” (membicarakan orang). Kondisi ini tentu saja berbeda dengan perempuan lainnya yang memiliki keterampilan, pendidikan, serta modal usaha. Agar kegiatan berjalan efektif, maka dalam tahapan ini juga dibentuk kelompok usaha masyarakat sebagai tempat bagi komunitas untuk mengembangkan diri. Dari kegiatan tersebut juga memberikan kesimpulan bagi pelaksana program bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang penting bagian dari strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Langkah selanjutnya, *implementor* masuk pada tahap ketiga atau *plan of action*. *Plan of action* merujuk pada Suharto (2009:115-116) merupakan “tahapan untuk merumuskan rencana aksi”. Kombinasi antara pendekatan *top Down* dan *Bottom up* digunakan untuk merencanakan

kegiatan, yang disebabkan karena secara umum tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Meskipun menggunakan paradigma *Top Down* di awal perencanaan hal yang menarik selanjutnya adalah mengkombinasikan paradigma ini dengan *Bottom Up*. Sebagaimana paradigma pemberdayaan bahwa prinsip masyarakat yang tahu dan mengerti menjadi aspek penting dalam perumusan kegiatan, hal ini sebagai upaya yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan. Parsons (2008:489) yang mengungkapkan bahwa “model *bottom-up* adalah sebuah proses pembuatan kebijakan dan (kemungkinan) pemberdayaan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan”.

Pada tahap ini juga pelaku perubahan kadangkala dibutuhkan masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana, khususnya bagi kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada penyandang dana tersebut. Pada tahap ini, diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut (Adi, 2013:183). Sebagaimana informasi dari RM sebagai pelaksana program dan MS yang merupakan beneficiaries sebagai berikut.

“Dalam pembuatan proposal untuk program budi daya jamur kelompok ibu-ibu ini kami bantu mas, bagaimana tata cara pembuatan serta prosedur apa saja yang harus dilakukan, semuanya kami dampingi” (RM, 26 Februari 2014).

Kemudian dipertegas kembali oleh informan MS melalui pernyataan sebagai berikut.

“Ya kalau masalah pembuatan proposal terus surat-surat lainnya kami diajari oleh perusahaan, jadi disini kami bukan hanya belajar budi daya jamur saja tapi juga bagaimana tata cara pengajuan apa saja yang kami butuhkan” (MS, 5 Maret 2014).

Paradigma *Bottom Up* digunakan dengan memposisikan implementor program sekaligus sebagai *Community Worker* atau agen perubah yang menjalankan peran sebagai *Fasilitator* yang memberikan pendampingan bagi sasaran program, *Broker* yaitu sebagai penghubung sistem sumber, sekaligus *Educator*. Peran fasilitasi oleh Ife dan Tesoriero (2008:559) dinyatakan sebagai “animasi (semangat) sosial, mediasi, dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengatur dan komunikasi personal”. Sedang peran broker, merefleksi dari pendapat Spergel, Zastrow dan Adi dalam Adi (2013:101–102) terkait “dengan upaya menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat”. Lebih lanjut Adi (2013:102) memberikan penjelasan bahwa peran *Educator* sebagai “pendidik mensyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan”.

Tahap keempat selanjutnya berupa *action and facilitation* yang dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR. Pada tahap ini program sudah mulai dilaksanakan, sebagaimana yang dikatakan oleh informan EW selaku penerima manfaat sebagai berikut.

“Sebelum mulai kegiatan budi daya jamur, ibu-ibu disini diundang oleh perusahaan mas, untuk mengikuti pelatihan dulu..soalnya kan belum ada yang bisa dan belum tahu gimana caranya membuat jamur” (EW, 19 Maret 2014).

Searah dengan penjelasan Ife dalam Adi (2008:102) bahwa “pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang berguna bagi mereka

secara khusus dan lebih luas lagi adalah bagi komunitasnya". Program pemberdayaan perempuan melalui budi daya jamur tiram dilaksanakan oleh PT. BSI dengan melakukan program pelatihan terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Oktober 2013 dan setelah itu mulai menjalankan program pembuatan hingga proses berjalannya budi daya jamur pada tanggal 22 Oktober 2013. Program tersebut untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Adanya program pemberdayaan perempuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perempuan sehingga terhindar dari masalah kemiskinan.

Pelatihan dilakukan dengan mendatangkan seorang mentor dari pengusaha jamur tiram yang sukses yang sudah berpengalaman dan memiliki banyak penghargaan, yaitu Bapak Kaiman dari Pasuruan. Selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut, RM bertugas untuk memonitoring juga mengevaluasi setiap minggunya untuk perkembangan program tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, PT. BSI memfasilitasi kelompok membangun usaha jamur tersebut dengan membantu pendanaan untuk membangun rumah jamur dan modal awal untuk pembelian bahan dan alat produksi. Seperti yang dikatakan oleh informan EW sebagai penerima program sebagai berikut ini.

"Sebelum mulai kegiatan budi daya jamur, ibu-ibu disini diundang oleh perusahaan mas, untuk mengikuti pelatihan dulu, soalnya kan belum ada yang bisa dan belum tahu gimana caranya membuat jamur" (EW, 19 Maret 2014).

Informasi ini diperkuat oleh SM yang juga sebagai penerima manfaat program sebagai berikut.

"Waktu itu kita diajari oleh Pak Kaiman. Pak Kaiman itu orang Pasuruan yang dimintai tolong oleh perusahaan untuk ngajari kita bagaimana caranya membuat jamur. Kami disini cuma modal niat dan tenaga aja mas, semuanya sudah disiapkan dari perusahaan. Ya seandainya nggak (tidak) dibantu sama

perusahaan mungkin nggak (tidak) akan jadi. Uang dari mana mas, biayanya lo banyak.. sampai sekarang mungkin kalau di total 20 juta sudah habis untuk biaya pembuatan rumah jamur ini" (SM, 19 Maret 2014).

Pada pertemuan selanjutnya kelompok mulai melaksanakan budi daya jamur tiram dengan berbekal pada pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki pada saat pelatihan budi daya jamur tiram dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh informan PN selaku penerima manfaat sebagai berikut.

"Setelah rumah sebagai lokasinya sudah jadi dan bahan-bahannya datang dari perusahaan,.. ya kita mulai produksi. Semuanya dikerjain bareng-bareng (bersama), mulai dari pembuatan bibit sampai panen" (PN, 5 Maret 2014).

Berdasarkan penuturan informan PN, diketahui bahwa partisipasi aktif semua anggota menjadi penguat bagi komunitas untuk berkembang dengan melibatkan semua anggota kelompok Pulau Merah Berkarya dalam setiap aktivitas budi daya. Pada tahapan ini peran *implementor* adalah sebagai *fasilitator* sekaligus *evaluator* yang menjamin bagi keberlangsungan usaha, sebagaimana informasi dari SM yang menjelaskan bahwa PT. BSI meminta kelompok budi daya jamur tiram untuk melaporkan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok selama proses pelaksanaan program budi daya jamur tiram dengan tujuan agar PT. BSI yakin jika kegiatan tersebut memang benar-benar sudah berjalan.

Implementasi dari sebuah program merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan penilaian apakah kegiatan tersebut sesuai bagi masyarakat ataukah perlu perbaikan dalam pelaksanaan sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi komunitas sasaran. Pada tahapan ini penulis mengidentifikasi adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan program yang berasal dari kelompok, sebagaimana yang diungkapkan anggota kelompok yang juga penerima manfaat program sebagai berikut.

“Ya gitu, kendalanya itu setiap orang kan beda-beda, ada yang rajin, ada yang setengah rajin, dan ada juga yang males (malas)... kemaren itu keluar 2 orang mas, tetapi juga banyak yang mau daftar, tapi kami nggak (tidak) akan menyerah kok, karena saya yakin program ini nanti akan sukses” (SM, 19 Maret 2014).

Kondisi yang sama diungkapkan Informan PN yang juga penerima manfaat sebagai berikut.

“Kendalanya ya tentang kekompakan, persoalannya kan produksi ini terus-menerus nggak ada batasannya... dan hasilnya nggak (tidak) bisa dinikmati secara langsung tetapi harus menunggu sampai jamurnya keluar... itupun nggak semua berhasil, namanya juga belajar mas, jadi ada yang bosan terus jarang hadir... yang awalnya satu kelompok 8 orang sekarang tinggal 6 orang, yang 2 keluar” (PN, 5 Maret 2014).

Evaluation and termination merupakan langkah ke lima yang akan dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009:115-116) konsep “*evaluation and termination* yaitu menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri, perlu adanya semacam penghakhiran kontrak atau *exit* strategi antara pihak-pihak yang terlibat”. Terkait dengan tahapan ini, Informan PN selaku penerima manfaat menjelaskan sebagai berikut.

“Ya kalau dari ibu-ibu evaluasinya itu waktu habis pembibitan mas, dievaluasi gimana tingkat keberhasilannya, biasanya masalahnya plastik bibitnya bocor, atau bahkan busuk...jika bibitnya 100 paling yang jadi 80an mas”(PN, 5 Maret 2014).

Kondisi ini diperkuat dari informasi Informan SM sebagai berikut.

“Kalau dari perusahaan mungkin evaluasinya dari laporan yang kita berikan setiap dua minggu sekali mas, karena kita setiap dua minggu sekali disuruh untuk membuat

laporan untuk diberikan kepada perusahaan mas” (SM, 19 Maret 2014).

Seperti juga penuturan dari EW sebagai anggota kelompok sekaligus penerima manfaat sebagai berikut.

“Kalau kami sudah bisa menjalankan usaha ini enak... ya dari pihak petugas perusahaan PT. BSI ada yang memantau kami selama berjalannya program ini sampai kami benar-benar sudah matang alias sudah bisa mandiri untuk menjalankan usaha ini” (EW, 19 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa program bukanlah hanya sebatas dilaksanakan tetapi juga dilaksanakan penilaian untuk mengkaji masalah dalam pelaksanaan serta solusi yang dapat ditawarkan oleh perusahaan. Pantauan perkembangan usaha ini terbaca oleh perusahaan melalui laporan mingguan dari kelompok usaha yang diberikan kepada Implementor program. Hal terpenting yang harus diperhatikan sebagai masukan dari pelaksana adalah keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program, partisipasi masyarakat harus diutamakan sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa kelompok usaha adalah miliknya, berkembang atau tidak usaha yang mereka jalankan akan berpengaruh secara langsung bagi kesejahteraan hidupnya. Terselip prinsip “kemadirian” dan bukanlah “amal” (*charity*) yang dapat membelenggu komunitas sasaran menjadi tergantung pada perusahaan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan konsep pemberdayaan, sebagaimana pendapat (Suharto, 2010:65) memberi pesan jelas bahwa “*community development* harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (*to empower*), bukan pertolongan (*to help*)”. Dalam kaitannya dengan PT. BSI program ini sekaligus memberikan manfaat sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan masyarakat sehingga mudah bagi perusahaan untuk mengetahui perkembangan gejala-gejala sosial yang ada dan menentukan arah kebijakan perusahaan khususnya terkait dengan program

CSR, disamping dapat sebagai investasi perusahaan dalam jangka panjang dan penting untuk kesinambungan dan keamanan kegiatan perusahaan.

F. Memandirikan Perempuan sebagai Aset Produktif Keluarga

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menggali potensi, kemampuan dan sumber daya yang ada pada perempuan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan menjadi kekuatan internal perempuan, seperti yang telah dituturkan oleh RM sebagai pelaksana program.

“Tujuan kami untuk memberikan kepelatihan dan memberi bantuan dana agar ibu-ibu selain mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang juga bermanfaat bagi mereka untuk peningkatan ekonomi secara mandiri” (RM, 26 Februari 2014).

Sependapat dengan implementor program (RM), MS sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) yang merupakan anggota dari Kelompok Merah Berkarya mengemukakan pernyataan berikut.

“Ya kami sebelum tahu apa yang telah dilakukan oleh perusahaan PT.BSI kami menilai kalau mereka cuman mencari keuntungan dan memanfaatkan kita saja. Ya kami kan takut dirugikan... kami juga susah kalau misalnya suami saya gagal panen atau suami tetangga saya tidak bisa melaut karena pasang surut air laut, terus kami kerja apa?, kan gitu... kami juga memikirkan nasib kami kalau-kalau dapat musibah kami tidak punya pegangan. Lha pas tahu PT. BSI memberikan bantuan kepada warga di sini kami jadi tahu tentang PT. BSI dan kami juga tahu kalau PT. BSI tidak hanya mementingkan perusahaannya dan membuat kita rugi...Mudah-mudahan, kegiatan ini bisa berkembang dan terus berjalan. Kan hitung-hitung kami belajar untuk menjadi pengusaha lumayan kalau memang bisa menghasilkan uang. Kami tidak terlalu menadah sama suami, hehehhee... kalau program ini berhasil kan yang senang kami juga bisa

membantu perekonomian keluarga” (MS, 5 Maret 2014).

Perubahan paradigma masyarakat bahwa perempuan bukan hanya sebagai “*konco wingking*” dalam mengelola rumah tangga menjadi faktor positif yang memudahkan program tersebut diterima oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh adanya kesadaran akan kelangsungan hidup yang muncul dari para perempuan sehingga dapat menjadi salah satu potensi yang memudahkan dalam proses pelaksanaan sebuah program pembangunan. Kondisi ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Yunus (2008:74) yang menyatakan sebagai berikut.

“Perempuan miskin juga terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan lebih baik dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki. Ketika seorang Ibu dari keluarga miskin mulai memperoleh pendapatan, impian keberhasilannya selalu terpusat di sekitar anak-anaknya. Prioritas kedua seorang perempuan adalah rumah tangganya... jika tujuan pembangunan ekonomi mencakup perbaikan standar hidup secara umum, mengurangi kemiskinan, menciptakan peluang kerja yang bermartabat, dan mengurangi kesenjangan, lumrah saja untuk melakukannya melalui perempuan. Bukan hanya karena sebagian besar kaum miskin dan menganggur serta mereka yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi adalah kaum perempuan, tetapi mereka juga lebih siap dan berhasil meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan suaminya.”

Hal ini di perkuat dengan pernyataan informan EW yang juga sebagai *beneficiaries* program, yang mengatakan hal berikut.

“Saya berharap mas, dengan adanya pemberdayaan dan bantuan dari pihak PT. BSI saya dan teman-teman bisa menghasilkan uang sendiri. Ya lumayan la mas hitung-hitung buat tambahan uang untuk nabung atau kebutuhan anak-anak nantinya” (EW, 19 Maret 2014).

Pemberdayaan akan terus berlangsung selama komunitas masih tetap ada dan mau

berusaha untuk memperdayakan dirinya. Diuraikan dari penuturan RM selaku *beneficiaries* sebagai berikut.

“Kami membuat program pemberdayaan ini semoga bisa berjalan dan berkembang sehingga bisa di teruskan pada keturunan selanjutnya, jadi kami membuat program yang bisa untuk di teruskan dan dikembangkan oleh masyarakat. Kan kalau bisa di teruskan dan dikembangkan enak mas... masyarakat sudah bisa mandiri dalam pemenuhan perekonomian dan kami pun tidak akan sia-sia memberikan program ini, karena program ini emmang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat agar bisa mandiri untuk melalui pasar yang semakin lama semakin banyak persaingan” (RM, 26 Februari 2014).

Didukung dengan pernyataan dari MS yang juga penerima manfaat sebagai berikut.

“Mudah-mudahan mas, kegiatan ini bisa berkembang dan terus berjalan. Kan hitung-hitung mas kami belajar untuk menjadi pengusaha lumayan kalau memang bisa menghasilkan uang. Kami tidak terlalu menadah sama suami, hehehhee... kalau program ini berhasil kan yang senang kami juga bisa membantu perekonomian keluarga” (MS, 5 Maret 2014).

Kesadaran masyarakat untuk tetap bertahan dan terlibat dalam program terlihat dari manfaat yang mereka rasakan, memberikan penjelasan bahwa perencanaan, dan strategi yang mengutamakan kegiatan yang sustain dalam paradigma pemberdayaan dapat lebih memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan program *Corporate Social Responsibility*.

G. Simpulan

Pengelolaan program CSR yang mengedepankan *sustainability* (keberlanjutan) menjadi salah satu kunci keberhasilan program yang dapat memandirikan masyarakat. Melalui perencanaan yang sistematis dan terencana yang terrefleksi dari pelaksanaan kegiatan yang lebih berbasis

pada konsep pemberdayaan, tercermin dari lima langkah pedoman pelaksanaan program yang dicanangkan oleh PT. BSI. Konsep pemberdayaan mampu membuka wacana bagi terbentuknya *image positif* masyarakat akan kehadiran sebuah perusahaan. Dari program ini juga memberikan gambaran bahwa perempuan yang sebelumnya dipandang hanya sebagai aset yang tidak bernilai secara ekonomis terhadap peningkatan pendapatan keluarga, diubah menjadi potensi yang mampu secara mandiri memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budimanta, A. Dkk. 2004. *Corporate Sosial Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD (Indonesia Center For Sustainable Development).
- Buletin Tumpang Pitu. 2012. *Besama Membangun Pesanggaran*. PT. Indo Multi Niaga.
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/26/0945513/Kaiman>. Dulu.Sopir.Kini.Juragan.Jamur, Diakses pada tanggal 30 Juni 2014.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development* (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

- Pranarka, M, Moeljarto. 1996. "Pemberdayaan wanita". dalam Prijono, Ed (Penyunting). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramida.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (corporate social responsibility)*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-undang no 40 Tahun 2007 pasal 74
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1
- Yunus, Muhammad. 2008. *Bank Kaum Miskin, kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Translate dari buku *Banker to the poor: Micro-Lending and the Battle Against World poverty*. Jakarta: Marjin Kiri.